



Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Deli Serdang Tahun 2018

Program analysis Alokasi Dana Desa (ADD) in empowerment of village Communities in the Village of Bangun Sari Deli Serdang Tahun 2018

Disa Devalia Rizki Aranda Lubis, Abdul Kadir, & Yurial Arief Lubis

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area

Abstrak

Program Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pelaksanaan alokasi dana desa melalui pembangunan fisik dan non fisik. Penelitian ini di latar belakang oleh Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari yaitu program Pencegahan KDRT yang telah ditetapkan di tahun 2018 yang mana program ini tidak dapat terealisasi dengan jumlah dana Rp 41.000.000,-. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu program KDRT serta apa saja yang menjadi kendala dan hambatan tidak tereslisasinya program tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga informan yang mengetahui serta informan tambahan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ada dua cara, yaitu data sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumentasi, sedangkan data primer seperti wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Deli Serdang Tahun 2018 belum cukup maksimal dalam penerapannya yang dapat diteliti melalui tiga indikator program menurut Charles O, Jones (1996) yaitu Pengorganisasian, Interpretasi, dan Penerapan atau Aplikasi.

Kata Kunci: Program, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

development. This research background by program Alokasi Dana Desa (ADD) in empowering village communities at Desa Bangun Sari namely the KDRT prevention program that was established in 2018 where this program could not be realized with a total of Rp 41.000.000,-, funds. This study aims to analyze the program Alokasi Dana Desa in the empowerment of rural communities, namely the KDRT program and what are the obstacles for not realizing the program. As for the method used in this study is a descriptive qualitative method. In this study, researchers used three informants who knew as well additional informants. There are two ways to collect data, namely secondary data such as book, journals and documentation, while primary data such as interview and observation. From the result of the above research it can be seen that the program analysis Alokasi Dana Desa (ADD) in empowering village communities at Desa Bangun Sari in 2018 not maximal enough in its application which can be examined through three program indicators according to Charles, namely organizing, interpretation and application.

Keywords: Program, Alokasi Dana Desa, community empowerment

How to Cite: Lubis, D.D.R.A. Kadir, A. & Lubis, Y.A. (2021). Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Deli Serdang Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(2) 2022: 56-62,

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di dalam mencapai tujuan suatu bangsa dan negara. Karenannya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya suatu demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk membentuknya perkembangan dan pembangunan masyarakat desa maka pemerintah mengeluarkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa itu sendiri untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dimana dijelaskan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Jaya dkk, 2020; Tambunan dkk, 2020).

Desa Bangun Sari merupakan salah satu desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa yang mana sebagian Alokasi nya diperuntukan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa di dalam beberapa program yang telah ditetapkan pada tahun 2018. (Pratama dkk, 2021; Risa dkk, 2021).

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. (Jamaluddin dkk, 2018; Saraan dkk, 2019).

Menurut Charles O, Jones (1996) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoprasikan program, yaitu:

1. Pengorganisasian, Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoprasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi, Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau Aplikasi, Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu program yang tidak terealisasi di Desa Bangun Sari yaitu, penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Diketahui bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan yang ada di Indonesia. KDRT itu sendiri menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Sinaga dkk, 2018; Hartanto, 2020).

Diketahui juga dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, data kekerasan terhadap perempuan menunjukkan jumlah laporan kekerasan pada 2018 mencapai 406. 178 kasus, naik 16,5% dibanding jumlah laporan pada 2017 yang berjumlah 392.610 kasus. Maka dengan adanya permasalahan tersebut Desa Bangun Sari ingin merealisasikan kegiatan program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana dapat membantu masyarakat awam, jika ada permasalahan tersebut terjadi di dalam rumah tangganya. (Setiawan dkk, 2021; Sembiring, 2014).

Fenomena yang terjadi pada Desa Bangun Sari dalam merealisasikan program tersebut dapat dilihat dari Penerapan atau Aplikasi Program yang mana dalam merealisasikan program tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, jumlah audiens yang tidak sesuai kuota dan dana yang masuk di penghujung tahun. (Sukrianto, A., & Saharuddin, E. 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bangun Sari Deli Serdang Tahun 2018”.

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak terealisasi di Desa Bangun Sari?
2. Bagaimana Kendala dan Hambatan tidak terealisasinya Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari Tahun 2018?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencegahan program Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak terealisasi di Desa Bangun Sari.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Bangun Sari Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti dan data yang dikumpulkan dan juga fakta yang akurat.

Peneliti melaksanakan penelitian di Kantor Desa Bangun Sari Deli serdang dilakukan selama bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 (selama satu bulan). Informan penelitian merupakan orang yang mengetahui segala kegiatan yang terjadi di dalamnya. Informan penelitian yaitu:

- a. Informan Inti, yaitu Kepala Desa Bangun Sari
- b. Informan Utama, yaitu Bendahara Desa dan Kaur Pemerintahan
- c. Informan Tambahan, yaitu Ibu PKK dan Masyarakat yang mengikuti Program KDRT.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang berwujud data primer dan sekunder. Jenis-jenis teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi, menurut Herdiansyah dalam penelitian Eliyani, 2018 Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis data. Teknik pengumpulan data dengan observasi lebih efektif dengan menggunakan cara mengamati dan mencatat langsung dilokasi penelitian dengan gejala-gejala yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.
2. Wawancara, dalam metode penelitian kualitatif wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bendahara Desa selaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dalam program-program pemberdayaan masyarakat desa.
3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger, agenda dan sebagainya (Suharsimi 2013: 274). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Rambe, N., Muda, I., dkk 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bangun Sari yang berada di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah. Yang mana Dana Desa tersebut diperuntukan untuk berbagai kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Desa tersebut. Salah satunya ialah Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Kekerasan Rumah Tangga (KDRT).

Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan program yang sering direalisasikan oleh Desa Bangun Sari dari tahun ke tahun dilihat banyaknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang semakin meningkat, yang mana tujuan dari dibuatnya program ini yaitu untuk memberikan

pengetahuan, pendidikan terhadap masyarakat apa itu KDRT, Faktor yang mempengaruhi KDRT serta cara pencegahan KDRT jika terjadi di dalam rumah tangga kita. (Sirait, R., Sinaga, R., dkk 2021).

Dalam merealisasikan program maka haruslah mempunyai struktur organisasi yang jelas agar dapat membentuk sumber daya yang kompeten dan berkualitas, dan dalam merealisasikan program maka harus juga mempunyai teknis dalam menjalankannya agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator dari Charles, Jones (1996) yang mana ketiga variabel tersebut berperan penting dalam pencapaian keberhasilan program yang akan direalisasikan, ketiga indikator tersebut yaitu:

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian ialah struktur pengorganisasian yang jelas yang diperlukan dalam mengoprasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Pengorganisasian untuk merealisasikan sebuah program yang akan dilaksanakan nantinya haruslah dipilih orang-orang yang bertanggung jawab dan berkualitas, pengorganisasian tersebut membutuhkan waktu sebelum program akan dilaksanakan. Mengenai indikator pengorganisasian berdasarkan hasil wawancara dari informan inti dan informan utama bahwa proses pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dalam program KDRT adalah orang-orang yang terbentuk dari sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas yang mana melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan lembaga yang terkait. Dimana pengorganisasian ini ialah agar program yang direalisasikan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Interpretasi

Interpretasi yaitu dimana pelaksana harus mampu merealisasikan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan tercapai. Jorge J.E. Gracia dalam bukunya *A Theory of Textuality* (dalam skripsi Syafa'atun Almirzanah) mengenalkan sebuah teori interpretasi yang dikenal dengan teori fungsi interpretasi. Fungsi umum interpretasi adalah menciptakan di benak audiens tentang pemahaman terhadap teks yang sedang ditafsirkan. Dengan kata lain, sebuah penafsiran harus menjadi sebuah tindakan yang dapat memberikan pengaruh pada audiens, yaitu menciptakan pemahaman terkait dengan teks yang dibuat (dalam skripsi Syafa'atun Almirzanah dan Sahiron Syamsuddin, 2011). Berdasarkan wawancara dari informan inti dan utama saling berkaitan dimana Proses Interpretasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam program KDRT dilakukan sesuai prosedur yang ada yaitu dengan melakukan perumusan konsep agar dapat dipahami oleh masyarakat, penyusunan program, pelaksanaan program, pemantauan program, dan hasil dari program tersebut.

3. Penerapan atau Aplikasi

Penerapan atau aplikasi dari suatu program haruslah adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas. Dimana prosedur kerja ini adalah suatu rangkaian tata kerja yang saling berubungan satu dengan yang lain dimana terlihat adanya suatu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh dalam menyelesaikan suatu bidang tugas. Tujuan dari prosedur kerja ialah memudahkan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan, menyederhanakan pelaksanaan untuk mengerjakan selanjutnya yang perlu, adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh pelaksana, membantu meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien, serta program kerja yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai jadwal kegiatan yang ditentukan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Berdasarkan dari ketiga informan yang di wawancara bahwa program pemberdayaan masyarakat desa dalam program KDRT dilakukan melalui prosedur kerja yang ada agar terealisasinya program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Program Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) sangatlah penting menurut masyarakat yang ada dikarenakan menambah edukasi dalam rumah tangga masyarakat awam yang tidak mengerti tentang apa saja yang menjadi penyebab KDRT serta dapat mengetahui cara pencegahan jika terjadi di rumah tangga.

Kendala dan Hambatan tidak teralisasinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam program Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam merealisasikan program pemberdayaan masyarakat desa tidak selalu terealisasi dengan baik, seperti program KDRT tahun 2018 di Desa Bangun Sari dikarenakan adanya kendala dan hambatan, yaitu:

1. Dana, merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terealisasi atau tidaknya program itu sendiri. Jumlah dana untuk program pemberdayaan masyarakat desa dalam program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri berjumlah Rp 41.0000.000,-. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan KDRT tidak dapat teralisasi dikarenakan Dana yang masuk ke rekening untuk Program tersebut masuk di penghujung tahun 2018 di tanggal 15 Desember. Sedangkan, setiap tanggal per 31 semua kegiatan harus selesai semua kegiatan yang ada di tahun 2018 harus selesai dalam satu tahun. Dana yang masuk di penghujung tahun tetapi program tidak dapat terealisasi maka dana tersebut dikembalikan.
2. Waktu Pelaksanaan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Pencegahan KDRT tidak terealisasi dikarenakan waktu pekerjaan yang terlalu singkat. Untuk melaksanakan program tersebut ketika dana sudah diberikan atau masuk ke rekening desa tidak dapat langsung di jalankan harus mengikuti mekanisme yang ada sehingga waktunya tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan semua kegiatan harus selesai di akhir tahun sedangkan dana tersebut masuk di tanggal 15 Desember 2018. Waktu pelaksanaan yang sangat sempit membuat program yang akan di realisasikan tidak dapat terealisasi maka program tersebut akan dimasukkan ke dalam program di tahun berikutnya.
3. Sumber Daya Manusia (SDM), selain dana dan waktu pelaksanaan, SDM menjadi salah satu penghambat tidak terealisasinya program KDRT dikarenakan SDM tersebut tidak mencukupi kuota yang telah ditetapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari pembahasan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa dalam menjalankan sebuah program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus mengikuti prosedur yang mana prosedur ini untuk merealisasikan keberhasilan program adapun indikator-nya yaitu Pengorganisasian, interprestasi dan penerapan atau aplikasi. Desa Bangun Sari sendiri tidak dapat merealisasikan program KDRT dikarenakan ada beberapa kendala dan hambatan yaitu Dana yang masuk di penghujung tahun, Waktu Pelaksanaan yang terlalu singkat dan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai kuota yang ditentukan sehingga para struktur organisasi harus mencari masyarakat dari rumah ke rumah untuk mengikuti program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina Mendrofa, M., Batubara, B., & Lubis, Y. (2021). Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara Dalam Merespon Kepentingan Perempuan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 65-72. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.513>
- Amelia, A., Sahabuddin, C., & Fitrah, N. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Wisata Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Wisata Bunga Anggrek Tondok Bakaru Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 125-134. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.689>
- Anastacia, D., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2021). Peranan Motivasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berbasis Kebutuhan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 176-184. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.747>
- Calesna, V., Batu Bara, B., & Angelia, N. (2020). PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KELEMBAGAAN DESA (STUDI PADA KANTOR DESA PERPANDEN KECAMATAN KUTALIMBARU). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2), 128-136. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i2.351>
- Charles O, Janes. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192-200. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Harahap, M., Siregar, N., & Novri, N. (2020). Peranan Pesan Dakwah di Instagram Terhadap Meningkatnya Minat Keagamaan Mahasiswa Psikologi UMA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2), 137-143. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i2.352>
- Hartanto, D. (2020). Institusi Inklusif Primum Non Nocere Kesejahteraan Sosial. *PERSPEKTIF*, 9(2), 119-129. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3549>

- Hendrawan, T., Sihombing, M., & Lubis, M. (2021). Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 65-74. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.722>
- Jamaluddin, Y. Sumaryana, A. Rusli, B. & Buchari, R.A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 6 (1): 14-24.
- Jaya, I., Humaizi, H., & Achmad, N. (2020). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. *PERSPEKTIF*, 9(2), 252-262. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3544>
- Ketike, R., Harahap, R., & Siregar, N. (2021). Analisis Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Bidang Pendapatan Pada Kabupaten Gayo Lues. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 99-117. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.726>
- Khairunnisa, A., Hasibuan, E., & Novri, N. (2021). Representasi Nilai - Nilai Karakter Masyarakat Minangkabau pada Film Surau dan Silek. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 143-150. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.710>
- Mulia, B., Ritonga, S., & Nasution, I. (2021). Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 12-18. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.509>
- Pratama, A., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *PERSPEKTIF*, 10(2), 371-382. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509>
- Rambe, N., Muda, I., & Matondang, A. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Memberdayakan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 73-80. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.482>
- Rejeki, R., Muda, I., & Batubara, B. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 59-64. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.481>
- Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *PERSPEKTIF*, 10(2), 739-753. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Ritonga, B., Siregar, N., & Novri, N. (2020). Teknik Komunikasi Interpersonal Guru BP dalam Menangani Siswa Bermasalah (Studi Kualitatif di SMA Negeri 11 Medan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2), 115-121. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i2.346>
- Rizam, T., Siregar, N., & Isnaini, I. (2021). Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 57-64. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.721>
- Samosir, Y., Warjio, W., Purba, A., & Isnaini, I. (2021). Analisis Kinerja Pegawai Di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat (Bp-Paud Dan Dikmas) Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 90-98. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.725>
- Saraan, M., Suwitri, S., & Yuniningsih, A. (2019). Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(2), 151-157. doi:<https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2800>
- Sembiring M.W., (2014). Persepsi Konstituen terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 2 (2): 134-147
- Setiawan, E., Nurwati, R., & Apsari, N. (2021). Kesejahteraan Anak Adopsi Usia Prasekolah (3-5 Tahun). *PERSPEKTIF*, 10(2), 609-615. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4893>
- Sianturi, R., Batubara, B., & Angelia, N. (2021). Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 185-191. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.748>
- Simamora, A., & Nababan, R. (2021). Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 201-208. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.740>
- Sinaga, D., Jamil, B., & Matondang, A. (2021). Makna Komunikasi Pada Komunikasi Interpersonal Gangguan di Simalungun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 1-11. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.435>

- Sinaga, M. Tarigan, U. Dewi, R. (2018). Peranan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *PERSPEKTIF*, 7 (2): 46-49.
- Sirait, R., Sinaga, R., & Lubis, M. (2021). Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Terhadap Kondisi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 44-56. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.524>
- Sirait, Y., Kadir, A., & Batubara, B. (2021). Efektivitas Rekrutmen Pegawai di SPBU Coco Pertamina Retail Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 53-58. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.515>
- Siregar, S., Kadir, A., & Batubara, B. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 47-52. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.483>
- Sitompul, D., Hasibuan, E., & Barus, R. (2021). Efektifitas Komunikasi Interpersonal Sales Staff Dalam Menerapkan Standar Pelayanan Sukses. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 27-36. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.508>
- Situmorang, C., Nasution, I., & Lubis, Y. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Kepala Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 37-46. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.519>
- Sukrianto, A., & Saharuddin, E. (2021). Strategi Pemerintah dalam Penerapan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 135-142. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.605>
- Sumiati, S., Harahap, R., & Isnaini, I. (2021). Penyelenggaraan Administrasi Di Bagian Umum Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 118-133. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.728>
- Sunan Kalijaga
- Surbakti, S., Sihombing, M., Warjio, W., & Isnaini, I. (2021). Implementasi Permendagri Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dalam Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 75-89. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.723>
- Syafa'atun, Almirzanah. 2011. *Pemikiran Hermeneutika*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Negeri
- Syafitri, U., Tarigan, U., & Batubara, B. (2021). Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print pada Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 19-26. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.436>
- Tambunan, B., Sihombing, M., & Harahap, R. (2020). Peranan Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 9(2), 439-446. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3942>
- Tarigan, D., Marbun, P., & Tarigan, E. (2020). PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2), 122-127. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i2.349>
- Undang-undang
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa